



Photo: Unsplash

#### Kepala LPEM FEB UI

Riatu Mariatul Qibthiyah, S.E., MA., Ph.D.

#### Pimpinan Redaksi

Dr. Alin Halimatussadiah

#### Redaktur Pelaksana

Assyifa Szami Ilman, S.E.

Giani Raras, S.E.

Calista Endrina Dewi, S.E.

#### Editor

Firli Wulansari Wahyuputri, S.E.



Scan untuk  
mengetahui  
informasi  
tentang LPEM  
lebih lanjut

Selamat datang di LPEM Newsletter Edisi November 2021. LPEM Newsletter merupakan buah pemikiran dan rangkuman kegiatan tim LPEM FEB UI. Edisi ini merupakan keluaran ketiga dan senantiasa akan diterbitkan setiap bulannya. Sejak 1953, LPEM FEB UI secara aktif telah melakukan kegiatan penelitian, konsultasi, dan pelatihan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah pembangunan di Indonesia. Kegiatan yang dilakukan banyak berfokus ke berbagai isu terkait kelembagaan, ekonomi regional, perdagangan internasional, keuangan dan perbankan, ekonomi fiskal dan moneter, pertanian, industri, pariwisata, pembangunan pedesaan, lingkungan, demografi, ketenagakerjaan, kemiskinan, dan UMKM.

Pada edisi kali ini, LPEM Newsletter akan merangkum terlaksananya kegiatan **Launching Dashboard Sustainable Recovery LPEM FEB UI**. Selain itu, peneliti kami juga menyampaikan tanggapannya dalam menyambut **"World Mental Health Day"**. Peneliti kami yang lain juga mengisi acara sebagai pembicara dalam kegiatan **AVPN Southeast Asia Summit** dalam sesi bertemakan **"Enabling Climate-Sensitive Development"**. Terakhir, peneliti kami baru saja merilis studi bertajuk **"Smoothing Sustainable Economic Transition in Indonesia: A Case of Coal-Mining Region"**.

Selamat membaca,

**Alin Halimatussadiah**

Ketua Kelompok Kajian Ekonomi Lingkungan  
LPEM FEB UI



FEUI.LPEM



lpemfebui



LPEMFEBUI

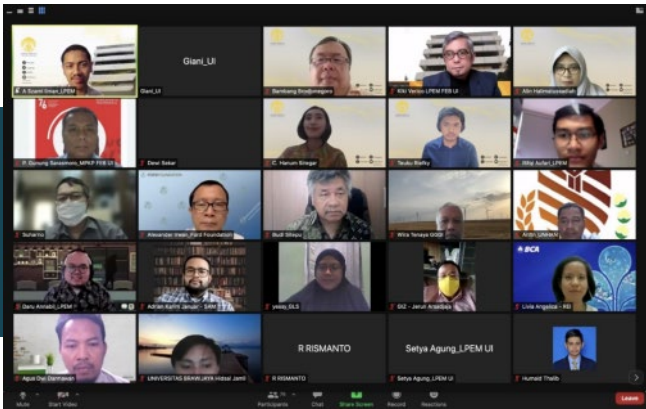


LPEM FEB UI



marcom@lpem-feui.org

# Peluncuran Dashboard Sustainable Recovery LPEM FEB UI: Urgensi Data dalam Mendorong Pemulihan Ekonomi yang Berkelanjutan



PPN/Bappenas RI 2016-2019), **Dr. Alin Halimatussadiyah** (Kepala Kajian Ekonomi Lingkungan LPEM FEB UI), serta **Teuku Riefky, S.E., M.Sc** dan **Chairina Hanum Siregar, S.E., M.E** (Peneliti LPEM FEB UI).

Pada acara ini, Teuku Riefky yang juga menjabat sebagai Lead for Sustainable Recovery Dashboard Team FEB UI menutup rangkaian kegiatan peluncuran Dashboard. Ia menjabarkan bahwa **BEST Dashboard** yang merupakan singkatan dari **Business Economics Sustainability Tracker** bertujuan untuk menjadi sebuah platform/wadah untuk data-data ekonomi sosial dan lingkungan yang memberikan kemudahan akses dan insights bagi masyarakat. "Kita juga bertujuan untuk memberikan data terkini dari indikator-indikator ekonomi, sosial dan environment yang (agar) kemudian masyarakat bisa terus update terhadap perkembangan terkini yang terjadi di sekitar kita" ujar Riefky. Lebih lanjut, ia juga menjelaskan bahwa terdapat tiga klasifikasi utama dari indikator yang disajikan dalam dashboard tersebut. "Indikator pertama adalah indikator ekonomi yang menyediakan indikator makroekonomi, seperti PDB, inflasi, tingkat pengangguran antar waktu dan antardaerah. Indikator kedua adalah indikator sosial yang terkait langsung dan tidak langsung dengan kesejahteraan masyarakat seperti infrastruktur, kesehatan, social dynamics, dan kondisi terkini terkait pandemi COVID-19. Indikator terakhir, indikator lingkungan yang mencakup data perubahan iklim dan lingkungan, seperti jumlah bencana alam, deforestasi, tingkat karbon, dan konsumsi plastik." tutup Riefky.

Isu perubahan iklim dan kesenjangan sejatinya bukan merupakan sebuah isu baru dalam perekonomian. Namun dengan adanya pandemi COVID-19, dampak dari isu tersebut kemudian semakin terasa di tengah masyarakat dan menimbulkan dampak yang cukup katastrofik. Kebutuhan akan data yang dapat menangkap fenomena-fenomena ini semakin genting agar proses perumusan kebijakan publik yang tepat dapat menghasilkan momentum "great restart" bagi perekonomian yang mempertimbangkan aspek keberlanjutan.

LPEM FEB UI pada 14 Oktober 2021 mengadakan acara peluncuran Dashboard Sustainable Recovery yang bertajuk "**Urgensi Data dalam Mendorong Pemulihan Ekonomi yang Berkelanjutan**". Peluncuran Dashboard yang berjudul BEST Dashboard ini bertujuan untuk menyediakan akses data yang terbuka bagi publik dan membantu merekam perkembangan indikator sosio ekonomi dan lingkungan. Acara peluncuran ini menghadirkan beberapa pembicara, di antaranya **Prof. Bambang Brodjonegoro, Ph.D** (Menteri

**Selengkapnya:**  
<https://bit.ly/PeluncuranBESTDashboard>

## Indonesia Perlu Kembangkan SDM di Bidang Kesehatan Mental

Isu kesehatan mental menjadi salah satu isu krusial yang perlu diperhatikan di tengah berlangsungnya pandemi COVID-19. Melambatnya roda perekonomian serta meningkatnya kondisi ketidakpastian memberikan dampak yang cukup signifikan pada kesehatan mental masyarakat. Pada 10 Oktober tiap tahunnya, **World Mental Health Day (WMHD)** diperingati sebagai upaya peningkatan kesadaran akan masalah kesehatan mental dan untuk memobilisasi upaya dalam mendukung kesehatan mental di seluruh dunia. World Mental Health pada tahun ini mengangkat tema mengenai "Mental Health in an Unequal World".

Memperingati **World Mental Health Day**

LPEM FEB UI  
UNIVERSITAS INDONESIA

- Hasil survei LPEM FEB UI menemukan bahwa pandemi dapat mempengaruhi kesehatan mental pekerja
- Sebanyak 39% responden khawatir mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan sebanyak 26% responden khawatir upahnya dikurangi
- Sementara itu, anggaran kesehatan adalah 5% dari APBN dan anggaran kesehatan mental hanya sekitar 1% dari anggaran kesehatan tersebut.
- Public Private Partnership dapat menjadi solusi terbatasnya anggaran untuk kesehatan mental, baik untuk infrastruktur maupun pemberian training bagi peningkatan kualitas SDM

FEUILPEM | LPEMFEBUI | lpemfebui | LPEM FEB UI

Menanggapi adanya WMHD 2021, **Chairina Hanum Siregar**, Peneliti dan Lead for Survey and Big Data on the Impact of COVID-19 LPEM FEB UI, mengatakan bahwa sejauh ini perhatian pemerintah Indonesia sudah cukup baik pada isu kesehatan mental, terbukti dari Indonesia telah memiliki Undang-Undang Kesehatan Jiwa, yang di dalamnya juga mengatur mengenai kesehatan mental. Namun undang-undang tersebut masih membutuhkan peraturan-peraturan turunan. "Petunjuk terkait mental health dapat menjadi isu yang perlu diperhatikan pemerintah" ujar Hanum.

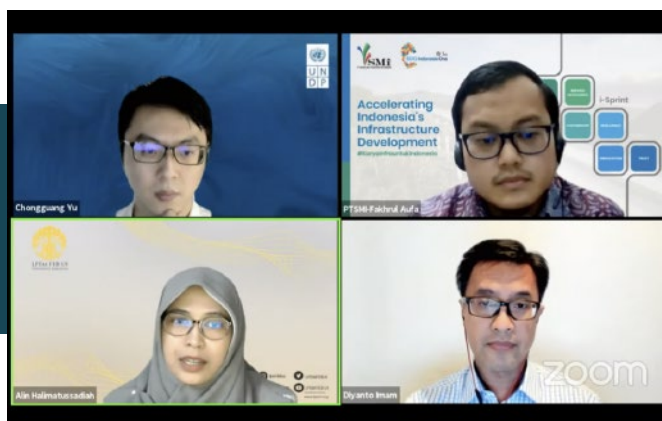
Di samping itu, Hanum juga menambahkan bahwa anggaran kesehatan adalah 5% dari belanja negara dan anggaran kesehatan mental besarnya sekitar 1% dari anggaran kesehatan tersebut dirasa masih belum cukup untuk mengatasi permasalahan kesehatan mental yang ada di Indonesia. "Dari sisi SDM-nya sendiri pada tahun 2020, Indonesia hanya memiliki kurang dari 1.000 psikiater, 2.000 psikolog klinis terdaftar, dan kurang dari 7.000 perawat jiwa komunitas, padahal data dari Riskesdas menunjukkan bahwa dari 1000 rumah tangga, 7 di antaranya terdapat anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Apakah

(anggaran) itu cukup?" cetus Hanum.

Hanum lebih lanjut menyampaikan, "Dengan fasilitas yang masih kurang, Indonesia masih banyak mengandalkan anggaran pemerintah. Mungkin Indonesia dapat meniru satu yang dilakukan India (dengan menerapkan) Public Private Partnership dalam bentuk tidak hanya dari infrastruktur, tetapi juga pemberian training untuk meningkatkan kualitas SDM". Kerjasama dari pemerintah pusat dan daerah, menurut Hanum, juga harus melibatkan akademisi dan dari pihak swasta, sebab urusan kesehatan jiwa tidak hanya kuratif saja, tetapi juga termasuk promotif dan preventif. Di skala mikro, seperti di tingkat perusahaan, setelah sesi jam kerja, perusahaan dapat mengadakan, *sharing session* atau pembekalan yang dibantu oleh profesional di bidang kesehatan mental atau bekerja sama dengan *wellness center*.

Selengkapnya:  
<https://bit.ly/WMHDLPEM211010>

## AVPN Southeast Asia Social Investment Summit 2021



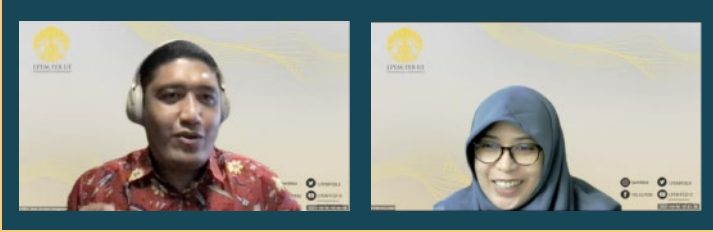
Asian Venture Philanthropy Networks (AVPN) mengadakan serangkaian webinar pada 26 Oktober 2021 sampai 27 Oktober 2021 dengan tajuk "**Southeast Asia Social Investment Summit 2021**". Southeast Asia Social Investment Summit diadakan dengan target untuk menghidupkan kembali perekonomian secara berkelanjutan, dengan fokus pada *sociopreneurship*, *future skilling*, dan *ecopreneurship*. **Dr Alin Halimatussadiah** hadir sebagai Pembicara pada salah satu rangkaian acara, yakni diskusi yang bertemakan "**Enabling Climate-Sensitive Development Solutions**". Dalam diskusi tersebut, Alin menyampaikan beberapa hal diantaranya mengenai kerangka kebijakan yang ideal untuk mendukung inovasi perubahan iklim. "Pemerintah Indonesia harus memainkan peran utama dalam solusi pembangunan yang sensitif terhadap iklim dari perspektif kebijakan. Pemerintah harus memberikan insentif kepada *green sector* sehingga kita dapat melihat transisi dari *brown sector* ke

*green sector*. Insentif dapat diberikan dalam bentuk fiskal atau kemudahan dalam berbisnis. Lalu, pembiayaan juga harus disediakan untuk *green sector*, dan ekosistem penelitian yang baik harus dibangun." papar Alin.

Selanjutnya, Alin memaparkan strategi yang perlu dilakukan untuk mencapai *net zero emission*. "Sektor swasta dan masyarakat perlu memiliki kesadaran yang kuat dan harus berjalan beriringan. Oleh karena itu, perlu adanya tiga hal yang dapat membantu mencapai *net zero emission*. Ketiga hal tersebut adalah komitmen terhadap praktik tata kelola sosial lingkungan perusahaan, investasi berdampak dan penerapan keuangan berkelanjutan." tutup Alin.

Selengkapnya:  
<https://bit.ly/AVPNSummit2021>

# Strategi Transisi Ekonomi Berkelanjutan di Industri Tambang Batu Bara



Batu bara merupakan sumber daya alam tidak terbarukan sehingga cadangannya pasti akan habis pada satu titik waktu di masa depan. Berbagai institusi mengestimasi bahwa cadangan batu bara Indonesia hanya akan bertahan dalam rentang 20 s.d. 60 tahun mendatang. Di sisi lain, pertambangan batu bara memiliki peranan yang cukup penting di dalam perekonomian Indonesia, khususnya Provinsi Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan sebagai wilayah yang memiliki porsi PDRB dari sektor pertambangan dan penggalian yang cukup besar. Tingginya tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap sektor ekstraktif berpotensi menghambat daerah tersebut untuk mengembangkan dan memanfaatkan secara optimal sektor ekonomi lainnya, sehingga akan menurunkan kemampuan daerah untuk melakukan transisi ekonomi terutama pada saat sektor ekstraktif tersebut telah habis atau mengalami kontraksi harga yang cukup dalam. Tanpa strategi mitigasi yang baik, kedua provinsi tersebut akan terpapar pada risiko perlambatan ekonomi akibat penurunan produksi tambang batubara. Sehingga, diperlukan strategi transisi ekonomi berkelanjutan yang tepat pada kedua provinsi tersebut.

Senin, 18 Oktober lalu LPEM FEB UI melakukan diseminasi riset bertajuk **"Smoothing Sustainable Economic Transition in Indonesia: A Case of Coal-Mining Region"**. Riset ini merupakan hasil kajian yang dilakukan oleh Tim Peneliti Ekonomi Lingkungan LPEM FEB UI. Riset ini bertujuan

untuk: (1) Mengidentifikasi sektor ekonomi yang tepat untuk dijadikan sasaran transisi ekonomi berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan; (2) Mengestimasi dampak dari skenario transisi ekonomi berkelanjutan terhadap pertumbuhan ekonomi, penerimaan pemerintah daerah, serta manfaat sosial dan lingkungan Provinsi Kalimantan Timur; dan (3) Menyusun kerangka fiskal daerah yang dapat dioptimalkan guna mendukung transisi ekonomi berkelanjutan di provinsi Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan.

Peneliti LPEM FEB UI, **Bisuk Abraham Sisungkun, S.E., M.Sc.** memaparkan dalam diseminasi bahwa dalam skenario sustainable transition industri kelapa sawit, Perikanan, dan Hotel Restoran menjadi pilihan sektor unggulan untuk transisi dari sektor batu bara di Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur. Simulasi yang dilakukan LPEM FEB UI mensyaratkan pemerintah daerah harus memulai kebijakan transisi sesegera mungkin. Namun demikian, pelaksanaan transisi ekonomi yang berkelanjutan tidak mudah, terutama dengan besarnya pembiayaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan sektor atau industri transisi. Untuk itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan berbagai sumber pembiayaan.

Pada akhir presentasi, Bisuk mengatakan terdapat 5 opsi kerangka fiskal untuk mengoptimalkan transisi ekonomi berkelanjutan, antara lain (1) Optimalisasi penerimaan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan untuk mendukung transisi ekonomi berkelanjutan; (2) Dana Alokasi Khusus (DAK); (3) Dana Insentif Daerah (DID); (4) Sovereign Wealth Funds (SWF); (5) Hibah domestik/internasional.

## Selengkapnya:

<https://bit.ly/DiseminasiBatuBara211018>

## Kilas Publikasi dan Kegiatan LPEM FEB UI

### Seri Analisis Makro Ekonomi: Analisa Inflasi, September 2021

Inflasi pada bulan Agustus tercatat sebesar 1,59 persen secara *year-on-year*, menguat dibanding bulan sebelumnya dengan inflasi sebesar 1,52 persen. Inflasi pada periode ini didorong oleh penguatan inflasi pada komponen harga yang diatur pemerintah dan harga barang bergejolak, meskipun inflasi inti mengalami sedikit pelemahan.

#### Selengkapnya:

<https://www.lpem.org/seri- analisis- makroekonomi- inflasi- bulanan- september- 2021/>

## Economic Brief

### Seri Analisis Makro Ekonomi: BI Board of Governors Meeting, September 2021

Tren penurunan kasus harian Covid-19 telah membawa beberapa sinyal positif ke indikator makroekonomi dan keuangan. Hal ini ditandai dengan sedikit perbaikan pada Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI). Di sisi eksternal, dukungan IMF juga meredakan ketidakstabilan dalam waktu dekat.

#### Selengkapnya:

<https://www.lpem.org/macroeconomic-analysis-series-bi-board-of-governor-meeting-september-2021/>

**Seri Analisis Ekonomi:  
Trade and Industry Brief, September 2021**

Salah satu sub-sektor ekonomi kreatif yang berkembang pesat secara global maupun nasional dalam dekade terakhir dan tidak terlalu terpengaruh oleh pandemi COVID-19 adalah industri video gim. Minat masyarakat dunia terhadap produk video gim sebagai hiburan alternatif di tengah pembatasan sosial akibat pandemi yang telah berlangsung lebih dari setahun semakin meningkat.

**Selengkapnya:**  
<https://www.lpem.org/seri- analisis-ekonomi-trade-and-industry-brief-september-2021/>

**Labor Market Brief,  
September 2021**

Di tahun 2022 mendatang, Indonesia terpilih menjadi tuan rumah dan Presidensi G20 yang merupakan forum negara-negara yang merupakan representasi ekonomi besar di dunia. Salah satu pembahasan yang diangkat dalam salah satu *working group* dalam G20 mendatang adalah isu mengenai kesempatan kerja bagi kelompok penyandang disabilitas.

**Selengkapnya:**  
<https://www.lpem.org/labor-market-brief-edisi-15-%e2%80%93-september-2021/>

**Policy Brief, September 2021  
Akselerasi Jaringan  
Transportasi Publik  
Modern sebagai Upaya  
Peningkatan Produktivitas  
dan Perekonomian  
Masyarakat Kota: Studi  
Kasus MRT Jakarta**

DKI Jakarta merupakan pusat kegiatan ekonomi di wilayah Jabodetabek dengan tingkat mobilitas yang tinggi baik dari daerah di sekitarnya maupun di dalam Kota Jakarta itu sendiri. Tingginya tingkat mobilitas masyarakat di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya mengakibatkan timbulnya berbagai tantangan, salah satunya adalah tingginya ketergantungan pada transportasi pribadi.

**Selengkapnya:**  
<https://www.lpem.org/akselerasi-jaringan-transportasi-publik-modern-sebagai-upaya-peningkatan-produktivitas-dan-perekonomian-masyarakat-kota-studi-kasus-mrt-jakarta/>

Indonesia berada di tengah tantangan pembangunan jangka panjangnya untuk keluar dari perangkap pendapatan menengah. Seringkali negara berkembang menghadapi tantangan yang sama, salah satu strategi umum yang harus diterapkan oleh Pemerintah Indonesia adalah mengembangkan rencana infrastruktur besar-besaran di seluruh negeri.

**Selengkapnya:**  
<https://www.lpem.org/resilient-infrastructure-in-indonesia-a-way-forward/>

**Working Paper:  
No.64, September 2021**

**Resilient  
Infrastructure in  
Indonesia: A Way  
Forward**

## Webinar dan Press Conference



**Tax Research Sharing Session:  
Lesson Learned from the Indonesian Tax Amnesty  
Program, 8 September 2021, LPEM FEB UI**

**Selengkapnya:** <https://www.youtube.com/watch?v=IKFgzCVmnKI>



## Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) LPEM FEB UI: Oktober—Desember 2021



Perencanaan dan Penganggaran  
(4—8 Oktober 2021)



Ekonomi Makro  
(11—13 Oktober 2021)



Ekonometrika  
(25—29 Oktober 2021)



Analisis Kebijakan Publik  
(8—12 November 2021)



Policy Paper  
(8—12 November 2021)



Regulatory Impact Assessment  
(22—24 November 2021)



Computable General Equilibrium  
(6—8 Desember 2021)



Monitoring dan Evaluasi  
(6—8 Desember 2021)

### Info Diklat

Website: [www.diklat.lpem.org](http://www.diklat.lpem.org)  
Pendaftaran: <https://linktr.ee/DiklatLPEMFEBUI>  
Email: [diklat@lpem-feui.org](mailto:diklat@lpem-feui.org) / [diklatlpem2021@gmail.com](mailto:diklatlpem2021@gmail.com)  
Whatsapp: <https://wa.me/6281196103130>

### Acknowledgement

LPEM Newsletter merupakan inisiatif yang didukung oleh David and Lucile Packard Foundation. Sejak 1964, David and Lucile Packard Foundation telah memberikan hibah dengan tujuan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat seraya memungkinkan terciptanya kegiatan keilmuan dan perlindungan sistem kehidupan alam. Dukungan dari David and Lucile Packard Foundation tidak hanya dalam produksi newsletter, namun juga rangkaian riset terkait isu ekonomi lingkungan yang dilakukan oleh LPEM FEB UI.